

**KEWENANGAN MENGADILI PERKARA
PERMOHONAN (*VOLUNTAIR*) DALAM HUKUM
ACARA PERDATA**

SKRIPSI



Oleh :
NURROSO
NIM : 2025010010R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**KEWENANGAN MENGADILI PERKARA
PERMOHONAN (*VOLUNTAIR*) DALAM HUKUM
ACARA PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



**Oleh :
NURROSO
NIM : 2025010010R**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : KEWENANGAN MENGADILI PERKARA
PERMOHONAN (*VOLUNTAIR*) DALAM HUKUM
ACARA PERDATA
NAMA : NURROSO
NIM : 2025010010R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 15 Juni 2026

Pembimbing I



Dara Puspitasari, S.H., M.H
NIPY : 107102020210472

Pembimbing II



Prihatin Effendi, S.H., M.H
NIPY : 107102020140082

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Ika Ayudyanti, S.H., M.H
NIPY : 10710202024247



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : NURROSO
2. NIM : 2025010010R
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul Skripsi : KEWENANGAN MENGADILI PERKARA PERMOHONAN (*VOLUNTAIR*) DALAM HUKUM ACARA PERDATA
6. Dosen Pembimbing I : Dara Puspitasari, S.H., M.H
Dosen Pembimbing II : Prihatin Effendi, S.H., M.H
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	02-12-2025	Judul		
2	02-12-2025	Rumusan Masalah		
3	17-12-2025	Metode Penelitian		
4	12-01-2026	Metode Penulisan		
5	09-02-2026	Pembahasan Bab I		
6	16-03-2026	Pembahasan Bab II		
7	12-05-2026	Pembahasan Bab III		
8	22-06-2026	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 22-juni 2026
9. Memenuhi Syarat Diujikan Pada Tanggal : 2-juli 2026

Pembimbing I

Dara Puspitasari, S.H., M.H

NIPY : 107102020210472

Pembimbing II

Prihatin Effendi, S.H., M.H

NIPY : 107102020140082

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudyanti, S.H., M.H

NIPY : 10710202024247

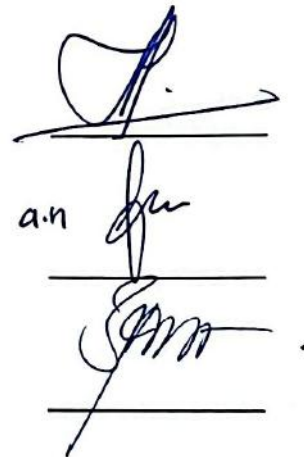
PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : KEWENANGAN MENGADILI PERKARA
PERMOHONAN (*VOLUNTAIR*) DALAM HUKUM
ACARA PERDATA
NAMA : NURROSO
NIM : 2025010010R

Telah dipertahankan /diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik
Pada Tanggal : 02-juli - 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Dara Puspitasari, S.H., M.H
107102020210472
Ketua
2. Prihatin Effendi, S.H., M.H
107102020140082
Anggota
3. Zakiah Noer, S.H., M.Kn
107102020180132
Anggota



Mengetahui Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn
NIPY : 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : NURROSO
NIM : 2025010010R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : KEWENANGAN MENGADILI PERKARA
PERMOHONAN (*VOLUNTAIR*) DALAM HUKUM
ACARA PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiarasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 15 Juli 2026

Yang menyatakan,



NURROSO

NIM. 2025010010R

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : NURROSO
NIM : 2025010010R
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksekutif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**KEWENANGAN MENGADILI PERKARA PERMOHONAN (*VOLUNTAIR*)
DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 15 Juli 2026

Yang menyatakan,



NURROSO
NIM. 2025010010R

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan (*Voluntair*) Dalam Hukum Acara Perdata”** yang merupakan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gresik. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa Penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh problematika terhadap kekosongan hukum acara yang mengatur mengenai perkara permohonan (*voluntair*) dalam kodifikasi kolonial HIR dan RBg. Kedua regulasi tersebut lebih menitikberatkan pada perkara sengketa (*contentiosa*), sehingga ketiadaan standarisasi baku mengakibatkan terjadinya disparitas penetapan hakim dan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk menjawab serta mengatasi problematika dalam hal perkawinan beda agama.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak atas dukungan dan kontribusi yang diberikan, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP selaku Rektor Universitas Gresik;
2. Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik;
3. Dara Puspitasari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan nasihat dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Prihatin Effendi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan nasihat dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan tiada henti;
6. Seluruh sahabat dan teman-teman almamater Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah banyak memberikan kenangan berharga.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan hasil dari skripsi ini masih perlu disempurnakan lagi. Namun dengan segenap kekurangan dan semangat yang ada, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Pembaca harap maklum dengan segala kekurangan dalam skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga penulisan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat yang baik dan pengetahuan bagi generasi muda maupun bagi semua pihak yang membutuhkan.

Gresik, 15 Juni 2026

NURROSO

ABSTRAK

KEWENANGAN MENGADILI PERKARA PERMOHONAN (*VOLUNTAIR*) DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Nurroso

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika kekosongan hukum acara yang mengatur secara rigid mengenai perkara permohonan (*voluntair*) dalam kodifikasi kolonial HIR dan RBg. Kedua regulasi tersebut lebih menitikberatkan pada perkara sengketa (*contentiosa*), sehingga ketiadaan standarisasi baku mengakibatkan terjadinya disparitas penetapan hakim dan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan, seperti pada permohonan penyamaan penulisan nama yang berbeda pada dokumen hukum. Kondisi ini memaksa hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara mandiri, yang jika tidak dibatasi dapat mencederai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data sekunder diperoleh melalui penelaahan draf undang-undang, Buku II Pedoman Teknis Mahkamah Agung, serta literatur hukum terkait yurisdiksi *voluntair*. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk mengkaji parameter batasan diskresi hakim dan implikasi yuridis dari kekosongan norma formil tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tengah kekosongan aturan eksplisit HIR/RBg, Asas *Ius Curia Novit* (hakim dilarang menolak perkara) menjadi dasar kewajiban konstitusional bagi hakim untuk tetap menerima, memeriksa, dan memutus perkara permohonan melalui *rechtsvinding*. Namun, tindakan ini dibatasi oleh parameter ketat di mana hakim menggunakan metode analogi konstruksi hukum acara sebatas fungsi administratif, serta dilarang keras menciptakan norma yang membebani atau menegasikan hak-hak keperdataan pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam persidangan *ex-parte*. Oleh karena itu, unifikasi dan kodifikasi regulasi khusus *voluntair* dalam RUU Hukum Acara Perdata nasional menjadi urgensi yang krusial demi mewujudkan kepastian hukum yang seragam.

Kata Kunci: Perkara Permohonan; Penemuan Hukum; Kewenangan.

ABSTRACT

AUTHORITY TO ADJUDGE REQUEST CASES (VOLUNTARY) IN CIVIL PROCEDURE LAW

Nurroso

Law Study Program, Faculty of Law, Gresik University

This research is motivated by the issue of the lack of procedural law that strictly regulates voluntary applications in the colonial codifications HIR and RBg. These regulations focus more on dispute cases (contentious), so the absence of standard guidelines leads to disparities in judges' decisions and legal uncertainty in court practices, such as in requests to standardize different name spellings on legal documents. This situation forces judges to find the law (rechtsvinding) independently, which, if not limited, can harm the principles of simple, fast, and low-cost justice.

The research method used in this paper is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Secondary data was obtained by reviewing draft laws, Book II of the Supreme Court Technical Guidelines, and legal literature related to voluntary jurisdiction. Data analysis was carried out qualitatively and descriptively to examine the parameters of judicial discretion limits and the legal implications of the absence of formal norms.

Research results show that in the absence of explicit HIR/RBg rules, the principle of Ius Curia Novit (judges are prohibited from dismissing cases) becomes the constitutional basis for judges to be obliged to accept, examine, and decide cases through rechtsvinding. However, this action is limited by strict parameters where judges use the method of legal procedure construction analogy only as an administrative function, and are strictly prohibited from creating norms that burden or negate the civil rights of third parties not involved in ex-parte proceedings. Therefore, the unification and codification of special voluntary regulations in the national Civil Procedure Law bill is a crucial urgency to achieve uniform legal certainty.

Keywords: *Application Matters; Legal Findings; Authority.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.5.1 Landasan Konseptual	10
1.5.1.1 Esensi Permohonan (<i>Voluntair</i>) Dalam Hukum Acara Perdata.....	10
1.5.1.2 Perbedaan Permohonan (<i>Voluntair</i>) dengan Gugatan (<i>Contentiosa</i>)	12
1.5.1.3 Jenis-Jenis Permohonan (<i>Voluntair</i>)	13
1.5.1.4 Kewenangan Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum (<i>Rechtvinding</i>)	17
1.5.2 Landasan Yuridis	19
1.5.2.1 Undang-Undang Tentang Peradilan Umum ...	19
1.5.2.2 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman	21
1.5.2.3 HIR dan RBg	23
1.5.2.4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	26
1.5.3 Landasan Teori	27
1.5.3.1 Teori Kewenangan	27
1.5.3.2 Teori Kepastian Hukum	29
1.5.3.3 Teori Penemuan Hukum (<i>Rechtvinding</i>)	32
1.5.3.4 Asas <i>Ius Curia Novit</i>	34
1.6 Penelitian Terdahulu	37

1.7	Metode Penelitian	38
1.7.1	Jenis Penelitian	38
1.7.2	Metode Pendekatan	39
1.7.3	Sumber Bahan Hukum	40
1.7.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
1.7.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	43
1.8	Sistematika Penulisan	44
BAB II	PARAMETER DAN BATASAN HAKIM DALAM MELAKUKAN PENEMUAN HUKUM (<i>RECHTSVINDING</i>) PADA PERKARA PERMOHONAN (<i>VOLUNTAIR</i>)	46
2.1	Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>) Sebagai Kewajiban Konstitusional Hakim	46
2.2	Parameter Penggunaan Metode Analogi dalam Hukum Acara Perdata	49
2.3	Prinsip <i>Ex-Parte</i> Sebagai Batasan dalam Menyusun Amar Penetapan	52
2.4	Batasan <i>Rechtsvinding</i> terhadap Perkara <i>Voluntair</i> yang Menyangkut Hak Pihak Ketiga	55
BAB III	KEKOSONGAN PENGATURAN EKSPLISIT DALAM HIR/RBG TERHADAP KEWENANGAN HAKIM DALAM MENERIMA, MEMERIKSA, DAN MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN (<i>VOLUNTAIR</i>)	60
3.1	Pengaturan Permohonan (<i>Voluntair</i>) dalam HIR dan RBg	60
3.2	Eksistensi Asas <i>Ius Curia Novit</i> sebagai Dasar Kewenangan Hakim di Tengah Kekosongan Norma	63
3.3	Implikasi Kekosongan Pengaturan terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Perdata Pemohon	66
3.4	Konstruksi Ideal Hukum Acara Perdata <i>Voluntair</i> dalam RUU Hukum Acara Perdata (<i>Ius Constituendum</i>)	69
BAB IV	PENUTUP	73
4.1	Kesimpulan	73
4.2	Saran	74
DAFTAR BACAAN		